|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (1) 223-236ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2017 |
|  |

**KESIAPAN KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI *HOST COUNTRY* DI BIDANG INVESTASI KELAPA SAWIT DALAM MENGHADAPI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* 2015**

**Suci Trisnia[[1]](#footnote-1)**

**Nim. 1102045092**

***Abstract***

*This research aim to describe the readiness of East Kalimantan as the Host Country in the sector of palm oil investment in facing the ASEAN Economic Community 2015. Writer try to describe and analyze the readiness of East Kalimantan from host country’s prespective. Sources to be presented in this research is secondary sources. Sources obtained through literature review, either books, internet, ect. The sources analysis is qualitative analysis. East Kalimantan is a potential area are included in the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic (MP3EI) declared as Kalimantan economic corridor that puts a wealth of natural resources to attract investors to invest. The wealth of natural resources with the greatest potential for palm oil is increasing in breadth and production. AEC East Kalimantan used as to gain a wider market and economic cooperation with the countries of investors in the management of palm oil into derivative products which have higher economic value. it is necessary to do readiness in various ways to support the implementation of the East Kalimantan economic purposes are, market opportunities, improved infrastructure, regulations and policies, governance of natural resources and improving the quality of human resources.*

***Keywords :*** *FDI, Host Country, ASEAN Economic Community 2015, palm oil, East Kalimantan*

**Pendahuluan**

*ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan realisasi integrasi ekonomi sesuai dengan visi ASEAN 2020 yang didasarkan pada kepentingan bersama negara anggota ASEAN. Empat pilar utama AEC yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, ternaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastuktur, perpajakan, dan *e-commerce*. (3) ASEAN sebagai kawasan dengan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam) dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan di luar, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Bagi Indonesia sendiri, AEC akan menjadi kesempatan yang baik karena mengurangi berbagai hambatan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat inilah yang menjadi kunci dalam masuknya arus modal keuangan berupa investasi asing yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Dengan kekayaan alam yang melimpah Indonesia memprioritaskan sektor peerkebunan dalam peningkatan perekonomian negara terutama dalam hal kelapa sawit dimana Indonesia menjadi salah satu negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional menetapkan bahwa industri berbasis kelapa sawit sebagai prioritas yang pengembangannya dapat dilakukan dengan pendekatan klaster. Pendekatan klaster industri ini merupakan tindak lanjut dari penerapan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang berfokus pada pengembangan potensi ekonomi dan peran strategis masing-masing wilayah. MP3EI terbagi kedalam 6 koridor ekonomi dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu klaster industri berbasis kelapa sawit terdapat di Kalimantan Timur yang menfaatkan potensi kelapa sawit yang terus mengalami peningkatan dalam hal luas lahan maupun jumlah produksinya. Hingga tahun 2015 Kalimantan Timur memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan yaitu 1.236.174 ha dan total produksi mencapai 9.004.518 ton.

Kelapa sawit menjadi komoditas utama di Kaltim karena pemerintah Kaltim melakukan strategi pasca migas dan batu bara yang dialihkan pada pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan sesuai dengan visi Kaltim Maju 2030. Pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan salah satunya ialah sektor kelapa sawit menjadi prioritas bagi Kaltim dalam pertumbuhan investasinya. Pengembangan klaster industri kelapa sawit menjadi peluang investasi yang dipromosikan kepada penanam modal baik dari luar maupun dalam negeri. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dipersiapkan menjadi pusat pengolahan *Crued Palm Oil* (CPO) beserta produk turunannya dan pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan berskala internasional.

**Kerangka Dasar Teori**

***Konsep Investasi Asing***

Investasi asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing didalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksankan itu. Investasi asing dapat berupa investasi langsung (*foreign direct investment*) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham perusahaan di dalam negeri. Investasi asing langsung (FDI) meliputi investasi kedalam asset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi pembelanjaan berbagai perlatan inventaris, dan sebagainya. Pengadaan modal asing ini baisanya diiringi dengan penyelenggaran fungsi-fungsi manajeman, dan pihak investor sendiri tetap mempertahankan kontrol terhadap dana-dana yang telah ditanamkannya. Penanaman modal asing secara langsung juga memberikan pengertian bahwa bagi pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik pemodal asing hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing , maka badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia. Investasi portofolio melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi, dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Dengan membeli obligasi investor menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk memperoleh imbalan tetap berupa suku bunga yang diterimanya dalam periode-periode tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 pengertian modal asing ialah sebagai berikut:

1. alat pembayaran luar negeri yang jelas tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiyaan perusahaan di Indonesia.
2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

***Konsep Host Country***

Pengertian negara penerima (*host country*) tertera dalam draft *United Nations Code of Conduct on Transnational Corporation* pada pasal 1 huruf d yang berbunyi :*“... The term host country means a country in which an entity other than the parent entity is located”.* Dengan demikian, *host country* berarti negara tempat perusahaan transnasional berlokasi sebagai negara asalnya.

*Multinational Corporations* (MNCs) menurut Oatley didasari karena adanya produksi yang baru di negara lain , maka hal tersebut memperluas pengawasan secara manajerial antar batas negara. Pengawasan tersebut terhadap pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) perusahaan dalam berinvestasi di negara tujuannya. Maka, MNCs menyoroti ketegangan dalam sektor ekonomi yang diatur oleh sistem politik dan perbatasan global dalam rangka mengurangi pengaturan wilayah nasional secara eksklusif (tertutup). Subjek dari sistem politik dan perbatasan global tersebut menyoroti hal – hal yang dianggap penting antar pemerintah karena MNCs sebagai instrument investasi produksi dari orde politik liberal dimana orde tersebut menyimpan modal, pertukaran dalam pengembangan teknologi, pengaturan distribusi sumber daya yang effisien dalam ekonomi global, dengan kata lain hal tersebut merupakan bagian dari dominasi instrument kapitalis dalam hal pengontrolan ekonomi *Host Country* (negara tujuan investasi).

*Foreign Direct Investment* (FDI) memberikan manfaat lainnya terhadap *Host Country* yaitu; (1) MNCs membantu kemakmuran negara kedua tersebut dengan menyediakan SDA yang tidak ada dinegaranya. (2) MNC mengatur para pembuat kebijakan di negara – negara asing (tujuan investasi MNCs). (3) MNCs membawa kemajuan dalam bidang teknologi dan ahli – ahli dalam hal menejerial di negara tujuan investasinya tersebut. (4) MNCs dapat membantu negara – negara tujuan investasinya dengan memperluas akses jaringan pasar.

Ada beberapa karakteristik *Host Country* yang dinilai potensial bagi *Foreign Direct Investment (FDI*). Pertama, Peluang pasar dimana negara atau wilayah tersebut memiliki jumlah konsumen yang besar dan yang terpenting ialah memiliki perkembangan pasar yang terus meningkat. Kedua, untuk FDI pada bidang sumber daya alam *host country* harus memiliki aset pendukung yang memadai. Aset pendukung tersebut yakni infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan kereta api yang digunakan sebagai alat pengangkutan bahan baku hingga menuju temapat pemasaran. Ketiga, setiap *Host Country* juga didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dimana tujuan dari investasi umumnya pada tenaga *low-skill*.

***Metode Penelitian***

Dalam metode penelitian penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif prediktif yaitu menggambarkan dan menganalisa mengenai kesiapan Kalimantan Timur sebagai *Host Country* pada sektor kelapa sawit dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif karena analisa yang dilakukan terhadap data primer dan sekunder kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi oleh penulis untuk memperoleh kejelasan dan kebenarasn menguatkan analisa terhadap data tersebut.

***Hasil Penelitian***

***ASEAN Economic Community 2015***

ASEAN atau *Association of Southeast Asian Nation* merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia Filipina, Singapura dan Thailand. Selama lebih dari empat dekade ASEAN telah mengalami banyak perkembangan yang positif dan signifikan menuju tahapan baru yang lebih intregatif dan berwawasan ke depan untuk dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur serta dipersatukan oleh hubungan kemitraan.

AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi Negara- negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC Blueprint memuat empat kerangka utama yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yag lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerse*
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam), dan
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi seccara penuh dengan perekonomian glibal dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningktakan peran serta dalam jejaring produksi global.

AEC 2015 akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi AEC 2015 akan berfokus pada 12 sektor prioritas yang terdiri atas tujuh sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau E-ASEAN). Berdasarkan pada ASEAN *Investment Agreement* dan ASEAN *Investment Guarantee Agreement* (IGA), ASEAN memiliki 4 (empat) persetujuan di bidang investasi yang tertuang dalam AEC blueprint, yaitu:

1. Perlindungan investasi, bertujuan untuk menyediakan perlindungan kepada semua investor dan investasi dicakup dalam perjanjian tersebut. Tindakan yang dilakukan antara lain untuk memperkuat:
2. Aturan mekanisme penyelesaian sengketa investor-state
3. Aturan transfer dan repatriasi modal, keuntungan, divindens, dan lain-lain
4. Cakupan ekspropiarsi dan kompensasi yang transparan
5. Perlindungan dan keamanan penuh
6. Perlakuan kompensasi atas kerugian akibat sengketa.
7. Fasilitas dan kerjasama, bertujuan utuk menyediakan peraturan, ketentuam, kebijakan, dan prosedur investasi yang transparan, konsisten dan dapat diprediksi. Tindakan yang dilakukan antara lain:
8. Mengharmonisasikan kebijakan investasi
9. Mengefektifkan dan menyderhanakan prosedur aplikasi dan persetujan investasi
10. Mempromosikan disseminasi informasi penanaman modal; aturan, peraturan, kebijakan dan prosedur, termasuk ,melalui *one-stop investment centre* atau *investment promotion board*
11. Memperkuat database dalam semua investasi yang mencakup barang dan jasa untuk fasilitasi formulasi kebijakan
12. Melakukan koordinasi dengan kementrian dan instansi terkait
13. Melakukan konsultasi dengan sektor swasta ASEAN untuk memfasilitasi investasi
14. Mengidentifikasi dan menyelesaikan kerjasama implementasi integrasi ekonomi *ASEAN-wide* maupun bilateral.
15. Promosi dan *awareness*, bertujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi. Tindakan yang dilakuakn antara lain:
16. Menciptakan iklim yang perlu untuk mempromosikan semua bentuk investasi dan wilayah pertumbuhan baru di ASEAN
17. Mempromosikan investasi intra-ASEAN, khususnya dari ASEAN 6 ke CLMV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam
18. Mendorong dan mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan UKm dan *Multinatinal Enterprises* (MNEs)
19. Mempromosikan misi-misi joint investment yang fokus pada kluster regional dan jaringan kerja produksi
20. Memperluas manfaat inisiatif kerjasama industri ASEAN disamping *AICO Scheme* untuk mendorong pengembangan kluster regional dan jaringan kerja produksi
21. Membangun jaringan efektif perjanjian bilateral tentang pencegahan pajak ganda diantara negara-negara ASEAN
22. Liberalisasi, bertujuan untuk medorong liberalisasi investasi secara progressif. Tindakan yang dilakukan antara lain;
23. Menerapkan perlakuan non-diskriminasi, termasuk perlakuan nasional (*national treatment*) dan perlakuan MFN kepada investor di ASEAN dengan pengecualian terbatas meminimalkan apabila perlu menghapus pengecualian tersebut
24. Mengurangi dan apabila memungkinkan menghapus peraturan masuk investasi untuk produk yang masuk dalam *Priority Integration Sectors* (PIS)
25. Mengurangi dan apabila memungkinkan, menghapus peraturan investasi yang bersifat menghambat dan hambatan lainnya. (*ASEAN Economic Community Blueprint,* www.asean.org)

***Kondisi dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Timur***

Kelapa Sawit sebagai salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu penghasil devisa negara, kelapa sawit juga bersifat padat karya (*labour intensive*) sehingga banyak menyerap tenaga kerja.Potensi kelapa sawit Indonesia terdapat dibeberapa provinsi salah satunya Kalimantan Timur. Era pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai pada tahun 1982 yang dirintis melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PTP VI dan luas tanam perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah luas tanam kelapa sawit tahun 2004 sebesar 171.580,50 ha dengan jumlah produksi 957.058 ton, hingga tahun 2014 luas areal kelapa sawit baru mencapai 1.020.413 Ha yang terdiri dari 236.952 Ha sebagai tanaman plasma / rakyat, 22.342 Ha milik BUMN sebagai inti dan 761.119 Ha milik Perkebunan Besar Swasta. Peningkatan jumlah luas tanam ini merupakan program pembangunan sektor perkebunan dimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Program Pengembangunan Kelapa Sawit Satu Juta Hektar pada 2011 yang ditetapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak. Program ini merupakan salah satu program revitaliasi pertanian dalam arti luas yang memerlukan kerjasama terkait dengan kabupaten dan kota se-Kaltim.

Program ini dilakukan sesuai dengan Program Revitalisasi Perkebunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 33 tahun 2007 yaitu, upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil. Berdasarkan rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada Koridor Ekonomi Kalimantan, simpul ekonomi utama yang dikembangkan pada koridor wilayah Kalimantan Timur yaitu simpul kelapa sawit sebagai pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi sumber daya migas dan tambang yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat diperbaharui dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah. Kalimantan melakukan transformasi ekonomi dari sumber daya alam non terbarukan ke sumber daya alam untuk terbarukan mendorong pengembangan sektor pertanian dalam arti luas.

Strategi transformasi pasca migas dan batu bara tersebut kemudian diimplementasikan sebagai visi Kaltim Maju 2030 dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pergeseran komoditi andalan Kaltim dari migas dan batu bara menjadi energi hijau terbarukan dilakukan karena kontribusi migas perlahan mulai turun dari 25,78 persen pada 2001 menjadi 14,42 persen di 2013. Komitmen Kalimantan Timur untuk melakukan kebijakan transformasi ekonomi berbasiskan SDA terbarukan telah disepakati dengan cara menerapkan scenario pertumbuhan ekonomi hijau atau *Green Economy*. (www.kaltimprov.go.id)

***Peluang dan Hambatan Investasi Asing Di Kalimantan Timur***

Pasar minyak nabati di pasar internasional merupakan salah satu pasar yang kompetitif, melibatkan lebih dari sembilan jenis minyak serta hampir diproduksidan dikonsumsi di semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Permintaan pasar CPO yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia maka konsumsi akan minyak nabati dan lemak dunia turut meningkat. Saat ini suplai minyak nabati dunia menduduki peringkat atas, selain dipasok oleh sekitar 30 juta ton soya bean oil, minyak sawit (CPO) sekitar 26 juta ton Penduduk dunia tahun 2002 mencapai 6,3 miliar orang, dimana Cina dan India yang berpenduduk paling banyak merupakan konsumen minyak terbesar di dunia, konsumsi minyak Cina melonjak menjadi 76 persen. Sementara India 45 persen dari konsumsi minyak makan (*edible oil*) tergantung kepada impor. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan terjadi kenaikan kebutuhan konsumsi minyak makan, dengan demikian volume produksi minyak makan (olein) dunia terdongkrak, yang akhirnya mendorong pertumbuhan *Crude Palm Oil* (CPO).

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan terjadi kenaikan kebutuhan konsumsi minyak makan, dengan demikian volume produksi minyak makan (olein) dunia terdongkrak, yang akhirnya mendorong pertumbuhan *Crude Palm Oil* (CPO).Disamping itu, pasar domestic Indonesia, hingga saat ini terdapat sekitar 23 jenis produk turunan CPO yang telah diproduksi di Indonesia. Dengan pengolahan CPO ini menjadi berbagai produk turunan, maka akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara karena harganya yang relatif lebih mahal dan stabil. Pemanfaatan CPO untuk produk olahan diantaranya yaitu oleh industri pangan (minyak goreng, margarin, *shortening, cocoa butter substitutes, vegetable ghee*) dan industri non pangan seperti oleokimia (*fatty acid, fatty alcohol, gliserin*) dan biodiesel. Industri pengolahan CPO Indonesia tidak terlepas dari permasalahan didalam negeri yang salah satunya adalah jaminan pasokan bahan baku yang belum sepenuhnya teratasi karena produksi CPO lebih banyak diekspor daripada dipasok ke industri dalam negeri. Konsumsi minyak sawit secara nasional menunjukkan bahwa ekspor bahan baku dalam wujud primer (CPO) lebih mendominasi sistem industri nasional. Bila hal ini terus dilakukan maka Indonesia akan semakin tertinggal dalam pengembangan industri hilirnya. Sejalan dengan perkembangan ekspor CPO, Indonesia menyadari bahwa ekspor dalam wujud primer sebenarnya kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan ekspor produk turunannya.

Dengan melihat peluang pasar domestik maupun internasional ini, pemerintah melakukan pengembangan produk hasil tanaman sawit. Hal ini dapat dilihat adanya rencana Pemprov Kaltim untuk mengembangkan kluster industri dan pelabuhan internasional (KIPI) berbasis kelapa sawit di Maloy Katim untuk mendukung Indonesia sebagai negara pengekspor CPO menuju penghasil berbagai produk turunan CPO dan meningkatkan berbagai nilai tambah produk turunan CPO melalui inovasi dan diversifikasi produk turunan CPO baik untuk bahan pangan maupun non pangan di wilayah timur Indonesia. Kebutuhan akan CPO inilah yang membukakan peluang yang sangat luas bagi investor asing untuk membangun industri pengolahan dengan memanfaatkan ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Faktor pendukung selain bahan baku ialah kemudahan akses ke pasar internasional yang dimiliki Kalimantan Timur dengan letak geografisnya yang strategis bagi jalur perdagangan internasional. (*Roadmap Industri Pengolahan CPO*, www.agro.kemenperin.go.id)

***Hambatan Investasi Asing di Kalimantan Timur***

Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal, melambatnya pertumbuhan perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia seperti yamg terjadi di Amerika Serikat, Jepang, China dan Eropa. Selain itu harga komiditas sawit dunia yang cenderung menurun di 2016.

Hambatan yang disebabkan oleh faktor internal yaitu;

1. Prosedur perijinan investasi yang rumit, panjang dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal peijinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, penguatan komitmen pemerintah daerah yang tercantum di dalam arah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan tahapan yang jelas untuk pengembangan industrialisasi. Melanjutkan percepatan reformasi birokrasi untuk mendukung perbaikan iklim investasi, terutama dalam hal memberikan kemudahan perizinan, pengadaan lahan, dan kepastian usaha. Mempercepat penerapan PTSP di daerah sehingga proses perizinan dapat terlaksana dengan cepat dan efisien. Serta belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi;
2. Rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur yang sebagian besar terus memburuk dan rusak akibat berbagai macam bencana. Menurut Kamar Dagang dan Industri Kaltim realisasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk akselerasi ekonomi didaerah dinilai belum optimal. Beberapa masalah infrastruktur yang dihadapi Kaltim yaitu peningkatan dan perbaikan jalan nasioal sepanjang 1,300 km dimana kondisinya saat ini hanya 35% saja dalam kondisi baik. Selain itu yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah penyelesaian pembangunan Bandara Samarinda Baru yang menjadi infrastruktur utama dimana kondisi Samarinda sebagai ibukota yang strategis namun ironisnya hanya Samarinda yang tak memiliki bandara sehingga aksesibililtas pembangunan ekonomi mengalami kendala. Tak hanya itu, Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara membutuhkan dukungan dari Kementerian PU karena jembatan tersebut mejadi salah satu akses transportasi untuk mempersingkat distribusi barang dari wilayah selatan ke wilayah tengah Kaltim dari proyek pembangunan jembatan ini dapat mengurangi biaya transportasi sebesar 12%. Disamping itu, infrastruktur pendukung Kluster Industri Maloy sebagai basis pengolahan kelapa sawit juga harus diperhatikan dibutuhkannya pembangunan akses jalan menuju kluster dan juga ketersediaan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan industri berskala internasional.
3. Serta beberapa hal lainnya seperti Iklim dan aturan ketenagakerjaan yang kurang kondusif dan garansi keamanan untuk melakukan kegiatan investasi/usaha.

***Peningkatan Infrastuktur***

Keberadaan prasarana dan sarana yang handal telah menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam mendukung pengembangan wilayah Kalimantan Timur , mengingat potensi wilayah Kalimantan Timur yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batubara), sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan serta hortikultur). Percepatan pembangunan KIPI Maloy dilakukan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah industri olien, industri peleburan almunium, stearin dan PFAD, industri asam lemak, industri biodiesel dan minyak goreng. Sedangkan kawasan penunjang, yaitu pelabuhan, power plant 2x100 MW, jalur rel kereta api dan terminal batubara. Dalam area industri olechemical dibangun pelabuhan CPO dengan kemampuan diatas 100.000 DWT. Pada sisi darat dibangun diatas areal seluas 115,38 hektare dengan fasilitas kantor, workshop, fire house dan storage tank sebanyak 19 unit dengan kapasitas masing-masing 3.000 ton/unit.

KIPI Maloy berfungsi sebagai pelabuhan kargo dan tangki timbun yang berskala pelayaran internasional. Pelabuhan Maloy juga digunakan sebagai pelabuhan umum skala pelayaran internasional dan pelabuhan batubara pelabuhan khusus skala pelayaran regional dan pelayaran intenasional. Selain itu Pelabuhan Maloy diarahkan sebagai pelabuhan barang dengan lingkup pelayanan internasional dan regional. Pelabuhan Maloy merupakan pintu gerbang distribusi dan koleksi seluruh hasil industri dan pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Kutai Timur. Pelabuhan Sangkulirang dan Pelabuhan Sangatta direncanakan untuk dapat melayani angkutan penumpang umum yang melayani rute-rute nasional dan terintegrasi dengan alur pelayaran nasional yang dikelola oleh PT. PELNI. (*Integrasi Infrastruktur KIPI Maloy Bappeda Prov. Kaltim,* [www.bappedakaltim.com](http://www.bappedakaltim.com))

***Regulasi dan Kebijakan Investasi Asing***

Adapun kebijakan Pemerintah Kalimantan Timur dalan hal investas asing tersebut ialah:

1. Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya mempermudah pengusaha untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kamilantan Timur perlu adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembenahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut akan menghilangkan biaya ekonomi tinggi dan akan memudahkan pihak yang diberi wewenang dan para pihak yang mendapat izin. Dengan adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut pengawasan akan lebih mudah, menarik minat investor serta memberi dampak positif, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 Pelayanan Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal bahwa “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

1. Pemberian Insentif Investasi
2. *Tax holiday*, merupakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK No. 130/PMK.011/2011 yang dikeluarkan pada 15 Agustus tahun 2011. Mencakup lima sektor prioritas yaitu logam dasar, kilang minyak bumi dan / atau bahan kimia organik dasar berasal dari minyak bumi dan gas alam, mesin industri, industri sumber daya terbarukan, dan industri peralatan telekomunikasi. Menerapkan minimum investasi Rp. 1 triliun, berbentuk badan hukum Indonesia yang telah ditetapkan setidaknya 12 bulan sebelum PMK *Tax Holiday* dikeluarkan, dan harus deposit minimal 10% dari investasi di perbankan Indonesia. Fasilitas yang diberikan antara lain, pembebasan pajak 5 - 10 tahun setelah perusahaan /proyek mulai produksi komersial (100 realisasi% & memiliki IUT). Setelah periode ini, wajib pajak dapat diberikan pengurangan PPh 50% dari PPh terutang selama 2 tahun setelah masa bebas pajak (tarif PPh 12,5% selama 2 tahun.
3. *Tax Allowance,* merupakan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 Fasilitas yang diberikan yaitu Pengurangan pendapatan bersih 30% dari total investasi, dibebankan dalam 6 tahun dengan masing-masing 5% per tahun. Pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (bangunan dan non-bangunan)*.*Kompensasi kerugian diperpanjang dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun. (*Naskah Akademik Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal, Badan Perijinan dan Permodalan Daerah Kalimantan Timur 2012*”, www.bppmd.kaltimprov.go.id)
4. Promosi dan Kerjasama

Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai investasi asing dilakukan beberapa kegiatan promosi dengan bekerjasama dengan pihak investor ataupun mengikuti forum-forum internasional. Salah satu kegiatan promosi tersebut ialah keikutsertaan Kalimantan Timur melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengikuti *Annual Investment Meeting* (AIM) yang diadakan di *Uni Emirat Arab* (UEA) pada April 2014. *Annual Investment Meeting* (AIM) merupakan kegiatan pameran dan forum bisnis, dan selalu mendapatkan perhatian global, karena melibatkan banyak peserta dari berbagai negara, baik selaku perusahaan sebagai entitas usaha/bisnis maupun dari instansi pemerintahan-nya, dengan tujuan mempromosikan keunggulan produk/jasa yang dihasilkan atau potensi ekonomi yang tersedia. Melalui even ini pemerintah Kalimantan Timur mempromosikan keunggulan KIPI Maloy sebagai industri berbasis *oleochemical* dilihat dari posisi strategisnya yang berada di ALKI II dan kecukupan pasokan CPO dari kawasan sekitarnya.

Dalam lingkup ASEAN, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia untuk memprakarsai kerjasama di bidang ekonomi melalui pembentukan lembaga persatuan negara penghasil minyak kelapa sawit atau *Council Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Kerjasama ini akan fokus membuat standardisasi seluruh produsen sawit baik standar di kebun maupun di industri pengolahannya dan juga terkait dengan pembinaan petani sawit, manajemen stok, dan pembangunan *Palm Oil Greean Economic Zone* (POGEZ). Masing-masing negara mengusulkan fokus lokasi dari kerjasama negara penghasil sawit ini dan Indonesia menempatkan kluster Industri Maloy Kalimantan Timur sebagai salah satu kawasan industri pengolahan sawitnya sedangkan Malaysia mengusulkan Lahad Datu, Bintulu, dan Tanjung Manis. Melalui kawasan tersebut diharapkan produk industri hilir yang dihasilkan dapat memenuhi standard *sustainability* yang bersertifikat internasional sehingga menciptakan keuntungan berupa preferensi area pemasaran, premium selling price, hingga fasilitas yang akan berdampak positif bagi perekonomian kedua negara.

***Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***

Pembangunan pengolahan kelapa sawit dalam skala besar akan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, mulai dari tahap persiapan lahan, pembangunan pabrik sampai proses produksi dan pemasaran. Dengan demikian, aktivitas pembangunan industri manufaktur kalapa sawit untuk mengahasilkan minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) ini akan memberikan dampak positif terhadap penduduk di sekitar lokasi proyek maupun transmigran yang datang untuk ikut dalam proyek tersebut. Selain itu, pengembangan proyek ini akan dapat meningkatkan pendapatan petani, di mana nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani bersangkutan. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan petani, jika pembangunan proyek ini disertai dengan pengembangan sarana pendidikan dan sarana kesehatan, akan membantu peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat setempat. Termanfaatkannya lahan ”tidur” menjadi areal produktif untuk industri dan perkebunan yang diiringi dengan berkembangnya pemukiman dan pusat perekonomian, serta semakin lancarnya aksesibilitas akan berdampak positif terhadap pengembangan wilayah dan tata ruang. Adanya upaya dari pemerintah umtuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penunjang dari keberhasilan investasi dalam pengelolaan kelapa sawit ini.

Dinas Perkebunan Kalimantan Timur juga berupaya untuk meningkatkan kualitas para petani pekebun yang dilakukan sejalan dengan kebijakan perluasan tanaman perkebunan sawit agar tidak hanya produksi dan luas lahan saja yang meningkat tetapi juga diimbangi dengan peningkatan mutu dari petani. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kelembagaan petani dalam mengelola perkebunan kelapa sawitnya. Dengan adanya kelembagaan petani, hal ini akan berdampak pada peningkatan skala usaha tani, karena para petani dapat mengembangkan kemitraan usaha pemasaran dan kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan posisi tawar para petani itu sendiri. Dalam upaya pengembangan keterampilan dan kelembagaan petani Dinas Perkebunan Kalimantan Timur mendorong peran para penyuluh perkebunan untuk melakukan pendampingan dan penyuluhan sehingga para petani dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit serta penanganan pasca panen. Penyuluhan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu SDM dan kelembagaan petani. ( www.disbun.kaltimprov.go.id)

***Kesimpulan***

*Asean Economic Community* 2015 membukakan peluang yang besar dalam kegiatan ekonomi terutama investasi asing. Dengan mekanisme bebas arus investasi maka setiap daerah bersaing dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menarik minat investor asing. Kalimantan Timur melihat peluang AEC ini dengan menetapkan kebijakan pengembangan pengolahan industri kelapa sawit dalam Kluster Industri dan Pelabuhan Internasioanl (KIPI) Maloy. Saat inivetasi asing ini masuk dalam percepatan industrialisasi maka sebagai *host country* Kalimantan Timur melakukan kesiapan diberbagai hal yaitu infrastuktur, peluang pasar, regulasi kebijakan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kesiapan yang dilakukan Kaltim ini terus mengalami peningkatan sebagaimana pemerintah terus melakukan upaya dalam perbaikan dan pengembangan potensi daerahnya.

***Referensi***

***Buku***

Fahmi, Irham, 2010, *Pengantar Politik Ekonomi*, Alfabeta, Bandung

Ikbar, Yanuar, 2006, *Ekonomi Politik Internasional- Konsep dan Teori*, Refika Aditama, Bandung

Irawan & M. Suparmoko, 2002, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE- Yogyakarta, Yogyakarta

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III, 2006, Evaluasi Kebijakan Investasi Kawasan Berikat dan Kerja Sektor Ekonomi di Kalimantan Timur

***Sumber lain***

Sekertaris Negara, *Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015*, <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911>

Badan Penanaman Modal Daerah, *Potensi & Peluang Investasi Sektor Perkebunan*, <http://bppmd.kaltimprov.go.id/index.php/artikel/baca/art_EydclghMO>

Badan Penanaman Modal Daerah, Transformasi Pasca Migas Merupakan Strategi Bukan Tanpa Alasan” <http://www.kaltimprov.go.id/berita-4600-transformasi-pasca-migas--merupakan-strategi-bukan-tanpa-alasan.html>

*ASEAN Economic Community Blueprint ,* [*http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf*](http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf)

*Executive Summary* *Pra Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Idustri Hilir CPO di KIPI Maloy Provinsi Kalimantan Timur*, Badan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur <http://bppmd.kaltimprov.go.id/file/buku/bk_vdoNaA6vfH0.pdf>

*Laporan Akhir Kajian Keunggulan Kalimantan Timur dalam Menarik Investasi, 2015, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur*

*Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Invesatsi Daerah Kalimantan Timur* <http://bppmd.kaltimprov.go.id/index.php/buku/detail/buku_6kHU4vDkpA>

 *Roadmap Industri Pengolahan CPO*”, <http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf>, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Jakarta, 2009

*Outlook Komoditi Kelapa Sawit*”, <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/outlook_kelapasawit_2014.pdf>, Pusat Data dan Sitem Informasi Pertanian, Jakarta, 2014

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sucitrisnia@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)